



Soal Gugatan Ijazah Jokowi Hakim PN Solo Putuskan Tak Berwenang

Solo, MIMBAR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). "Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini," kata ketua majelis hakim

■ Bersambung ke Hal 11



Kompolnas Minta Bareskrim Umumkan Hasil Gelar Perkara

Jakarta, MIMBAR - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Bareskrim Polri untuk segera mengumumkan hasil gelar perkara khusus di kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Komisiner Kompolnas Choirul Anam usai mengikuti gelar perkara khusus selaku pengawas eksternal, pada Rabu (9/7) kemarin. Anam mengatakan pelaksanaan gelar

■ Bersambung ke Hal 11

Temuan PPATK Ratusan Penerima Bansos Diduga Danai Terorisme

Jakarta, MIMBAR - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada ratusan bantuan sosial (bansos) diduga terlibat dalam pendanaan terorisme.

Temuan itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana usai menggelar rapat anggaran di Komisi III DPR, Kamis (10/7). Ivan menyebut lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dapat bansos yang terindikasi mendanai terorisme. "Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan.

Selain terlibat pendanaan terorisme, Ivan mem-

■ Bersambung ke Hal 11



Khofifah Diperiksa KPK di Polda Jatim

Surabaya, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tak memperlakukan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa secara istimewa dalam pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi kasus korupsi pengurusan dana hibah APBD

■ Bersambung ke Hal 11



Eks Menteri BUMN Ditetapkan Tersangka

Surabaya, MIMBAR - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur. Penetapan tersebut terkait dugaan kasus pemalsuan surat dan penggelapan.

Penetapan status tersangka diketahui berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke-8 yang ditujukan kepada Rudy Ahmad Syaifei Harahap tertanggal Senin, 7 Juli 2025.

Selain Dahlan Iskan, Ditreskrim juga menetapkan

■ Bersambung ke Hal 11

Hasto Minta KPK Tangkap Harun Masiku

Jakarta, MIMBAR - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK segera menangkap buronan Harun Masiku agar perkara suap yang menjeratnya terungkap terang benderang.

"Demi keadilan dan fairness, terdakwa di persidangan ini meminta KPK segera menangkap Harun Masiku agar menjadi terang pokok perkara suap tersebut," kata Hasto saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Hasto menilai Harun Masiku perlu segera ditangkap agar bisa dikonfrontir kesaksiannya dengan eks Kader PDIP Saeful Bahri yang disebut banyak menyampaikan keterangan baru dalam kasus ini. Ia mengatakan keterangan baru

■ Bersambung ke Hal 11



100 Bayi Prematur di Gaza Sekarat

Gaza, MIMBAR - Lebih dari 100 bayi prematur di Jalur Gaza dalam kondisi kritis, lantaran rumah sakit tempat mereka dirawat kini mengalami krisis bahan bakar imbas pengepungan Israel.

Dua rumah sakit terbesar di Gaza yakni Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, melaporkan kondisi darurat pada Rabu (10/7), seiring terus berlanjutnya gempuran Israel dalam 24 jam terakhir.

Direktur Rumah Sakit Al-Shifa,

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal
Salat

15 MUHARRAM 1447 H

Imsak : 04:49 WIB

Subuh : 04:59 WIB

Zuhur : 12:33 WIB

Ashar : 15:59 WIB

Maghrib : 18:42 WIB

Isya : 19:57 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Jangan Stigma Warga Miskin Teroris

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Pernyataan mengejutkan kembali datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam laporan terbarunya, disebutkan bahwa terdapat ratusan rekening milik penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam aktivitas pendanaan terorisme. Temuan ini sontak menimbulkan kegelisahan di ruang publik: benarkah warga miskin yang selama ini bergantung pada bansos bisa menjadi aktor dalam jaringan kejahatan terorganisir?



■ Bersambung ke Hal 11



DPR-Pemerintah Sepakat Masukan Impunitas Advokat di RKUHAP

PANJA (Panitia Kerja) RKUHAP Komisi III DPR dan pemerintah bersepakat untuk memasukkan aturan soal impunitas atau kekebalan pidana terhadap advokat dalam revisi KUHAP. Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habubirokman mengatakan bahwa aturan itu merupakan usulan sejumlah organisasi advokat selama proses rapat dengar pendapat RKUHAP.

■ Bersambung ke Hal 11

